

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014-2016

Ayu Dita Islami
ayuditaislami@gmail.com

Jurusan D3 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio efektivitas selama tahun 2014 – 2016; (2) kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio pertumbuhan dari tahun 2014 – 2016; dan (3) kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio kemandirian dari tahun 2014 – 2016. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2014 sebesar 102,47%; tahun 2015 sebesar 102,36%; dan tahun 2016 sebesar 102,64%, sehingga dari tahun 2014 – 2016 dikatakan efektif; (2) kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar -0,1%; tahun 2015 sebesar 7,33%; dan tahun 2016 sebesar 9,41%. Tahun 2014 dikatakan memiliki pertumbuhan yang negatif, sedangkan tahun 2015 dan 2016 dikatakan memiliki pertumbuhan yang positif; dan (3) kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio kemandirian dikatakan delegatif karena pada tahun 2014 – 2016 hasil perhitungan adalah tak terhingga.

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang menjadi UU No.32 tahun 2004, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan memiliki kemandirian keuangan daerah yang besar diharapkan daerah tidak akan lagi bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun hal itu tidak juga berarti bahwa daerah yang telah memiliki kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah tersebut sudah tidak memerlukan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Analisis laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen adalah salah satu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen yaitu pemenuhan kebutuhan rutin yang belum dapat ditentukan besarnya pengeluaran dan terjadinya gagal lelang. Gagal lelang yang dimaksud adalah saat lelang akhir tahun peserta lelang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan kegiatan ini dilakukan tidak hanya satu kali. Bahan yang dilelang seperti Tatanan Transportasi Lokal (2008). Masalah pada penelitian ini yaitu kurangnya transparansi terkait pengelolaan sumber dana dari retribusi parkir, pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi angkutan umum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Pertumbuhan?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Kemandirian?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Analisis Kinerja Keuangan yang hanya dilihat dari aspek Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas.
2. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

3. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Kemandirian.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan; serta untuk memberi informasinya (Mardiasmo, 2002:175).

2.2 Rasio Keuangan

Menurut Mahsun (2012:142), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan bermakna. Menurut Mahsun (2012:151), analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis laporan keuangan yang banyak digunakan karena dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar pembandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat komponen rasio itu sendiri. Analisis rasio keuangan adalah membandingkan nominal (angka – angka) yang terdapat pada laporan keuangan guna mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu.

2.3 Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2012:25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kesimpulannya kinerja keuangan adalah tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan di bidang keuangan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui kemampuan suatu instansi atau daerah dalam mengelola keuangannya.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang didapat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Jl. Indrakila No.36 Kebumen.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data dokumentasi yang terdapat pada laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2014 – 2016. Sumber data diperoleh dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat salinan dari data keuangan yang sudah ada berupa laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2014 sampai tahun 2016.

3.4 Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan – perhitungan menggunakan rasio keuangan yang sesuai dengan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian.

1. Rasio Efektivitas

Mengukur tingkat efektivitas output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas (Mahsun,2012:187):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010:138), Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan
Tahun t = tahun yang dihitung

Tahun (t-1) = tahun sebelumnya

3. Rasio Kemandirian

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula Rasio Kemandirian (Halim,2007:232) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

- 1) Pola hubungan instruktif (0% - 25%), di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif (25% - 50%), yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif (50% - 75%), peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif (75% - 100%), yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan, pertumbuhan kinerja keuangan, dan kemandirian keuangan Dinas Perhubungan. Data-data yang dibutuhkan adalah data target dan realisasi anggaran pendapatan yang dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

1. Rasio Efektivitas

- 1) Tahun 2014 = $\frac{1.423.304.710}{1.389.000.000} \times 100\% = 102,47\%$
- 2) Tahun 2015 = $\frac{1.527.672.220}{1.492.434.000} \times 100\% = 102,36\%$
- 3) Tahun 2016 = $\frac{1.671.578.650}{1.628.574.000} \times 100\% = 102,64\%$

Tabel IV.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2016.

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Prosentase (%)	Kriteria
2014	1.423.304.710	1.389.000.000	102,47%	Efektif
2015	1.527.672.220	1.492.434.000	102,36%	Efektif
2016	1.671.578.650	1.628.574.000	102,64%	Efektif

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa rasio efektivitas Dinas Perhubungan tergolong efektif. Dilihat dari tahun 2014 sebesar 102,47% dengan kriteria efektif, tahun 2015 sebesar 102,36% dengan kriteria efektif, dan tahun 2016 sebesar 102,64% dengan kriteria efektif. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang ditargetkan.

2. Rasio Pertumbuhan

$$1) \text{ Tahun 2014} = \frac{1.423.304.490 - 1.436.098.490}{1.436.098.490} \times 100\% = -0,1\%$$

$$2) \text{ Tahun 2015} = \frac{1.527.672.220 - 1.423.304.710}{1.423.304.710} \times 100\% = 7,33\%$$

$$3) \text{ Tahun 2016} = \frac{1.671.578.650 - 1.527.672.220}{1.527.672.220} \times 100\% = 9,41\%$$

Tabel IV.2 Perhitungan Realisasi Penerimaan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Prosentase (%)
2013	1.436.098.490	
2014	1.423.304.710	-0,1%
2015	1.527.672.220	7,33%
2016	1.671.578.650	9,41%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa rasio pertumbuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sebesar -0,1% menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan pendapatan yang negatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dikarenakan adanya penurunan jumlah pendapatan tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

3. Rasio Kemandirian

$$1) \text{ Tahun 2014} = \frac{1.423.304.710}{0} \times 100\% = \text{Tak terhingga}$$

$$2) \text{ Tahun 2015} = \frac{1.527.672.220}{0} \times 100\% = \text{Tak terhingga}$$

$$3) \text{ Tahun 2016} = \frac{1.671.578.650}{0} \times 100\% = \text{Tak terhingga}$$

Tabel IV.3 Perhitungan Realisasi Pendapatan dan Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Pendapatan	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Prosentase (%)	Pola Hubungan
2014	1.423.304.710	0	Tak terhingga	Delegatif
2015	1.527.672.220	0	Tak terhingga	Delegatif
2016	1.671.578.650	0	Tak terhingga	Delegatif

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa rasio kemandirian Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan pekerjaannya. Hal itu dikarenakan rasio kemandirian yang diperoleh pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah tak terhingga.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2014 – 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio efektivitas telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam merealisasikan pendapatannya sesuai dengan yang direncanakan. Rasio efektivitas pada tahun 2014 dengan prosentase sebesar 102,47%; tahun 2015 prosentase menurun sebesar 0,11% menjadi 102,36%; dan tahun 2016 prosentase naik sebesar 0,28% menjadi 102,64%. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan.
2. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari rasio pertumbuhan selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang negatif dikarenakan rasio pertumbuhan dengan prosentase sebesar -0,1%, tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang positif dengan rasio pertumbuhan sebesar 7,33%, dan tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif dengan rasio pertumbuhan sebesar 9,41%.
3. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari rasio kemandirian tergolong dalam pola hubungan delegatif atau dapat

dikatakan sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan pekerjaan dinas. Hal itu dikarenakan rasio kemandirian Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masuk dalam pola hubungan delegatif dengan prosentase tak terhingga.

5.2 Saran

1. Dari sisi efektivitas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dapat meningkatkan efektivitas yang sudah ada sehingga untuk kedepannya tetap dipertahankan atau ditingkatkan lagi.
2. Dilihat dari rasio pertumbuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dapat mempertahankan pertumbuhan yang positif untuk kedepannya. Untuk mempertahankan atau meningkatkan rasio pertumbuhan misalnya dengan cara meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen harus tetap mempertahankan kemandirianya dalam melaksanakan tugas.
4. Penelitian ini dibatasi pada rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian serta jangka waktu yang digunakan adalah 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih terperinci lagi dengan menambah rasio-rasio yang digunakan, menambah jangka waktu penelitian yang tidak hanya 3 (tiga) tahun, dan dapat memperluas lingkup wilayah penelitian seperti menambah tempat penelitian atau mengganti tempat penelitian. Selain itu diharapkan dapat memperoleh akses data keuangan sehingga dapat terlihat berapa potensi retribusi parkir, pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bina Nusantara. 2017. Empat Kualitas Utama sebuah Laporan Keuangan (bagian 1/2). <http://accounting.binus.ac.id/>. 9 Januari 2018 (04:52).
- Cahya, A.M. 2010. Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengukurannya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Firdaus. 2016. Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian Rokan Hulu.
- Fulcra Asia. 2016. Empat Kualitas Utama sebuah Laporan Keuangan. <http://fulcra.asia/>. 9 Januari 2018 (05:25).
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kadariusman. 2011. Akuntansi Pemerintahan: Laporan Keuangan Pemerintahan. <http://blog.stie-mce.ac.id/>. 19 November 2017 (00:40).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Pemerintah Edisi Dua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga. Jakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Dua*. BPFE. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Natalia, Listiana. 2015. Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Sosio-Humaniora* 6(1).
- Oppier, Hermi. 2013. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Benchmark* 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. 2018. www.kebumenkab.go.id. 10 Juni 2018 (14.15).
- Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Among Makarti* 7: 83-112.
- Ropa, M.O. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 2: 738-747 .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*.